



# HULONDALO

**JURNAL ILMU PEMERINTAHAN DAN ILMU KOMUNIKASI**

Available online <https://ejournal.unisan.ac.id/index.php/jipik/index>

## **Akuntabilitas Kinerja Aparatur Dalam Meningkatkan Iklim Investasi Di Kabupaten Gorontalo**

### ***Performance Accountability In Improving The Investment Climate In Gorontalo District***

**Abdul Wahab Podungge<sup>1</sup>, Abdul Madjid Podungge<sup>2</sup>, Arif Mahfudin Ibrahim<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>)Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Gorontalo,Indonesia

<sup>2</sup>)Program Studi Hukum, Universitas Nahdatul Ulama,Indonesia

<sup>3</sup>)Program Studi Hukum Bisnis, Universitas Bina Taruna Gorontalo,Indonesia  
podunggewahab@gmail.com <sup>1</sup> univnugoabdulmadjid@gmail.com <sup>2</sup>  
podunggewahab@gmail.com <sup>3</sup>

#### **ABSTRAK**

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan 1) bagaimana kebijakan strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan iklim investasi; dan 2) bagaimana capaian kinerja organisasi perangkat daerah dalam meningkatkan iklim investasi. Metode penelitian yang digunakan yakni metode kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif yang terdiri dari tiga komponen analisis yakni: 1) Reduksi Data; 2) Penyajian Data; 3) Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan. Hasil artikel menunjukkan bahwa: 1) Pada indikator akuntabilitas kebijakan strategis pemerintah daerah, dominan informan dan berbagai pertimbangan para ahli serta analisis penulis mengharapkan adanya kejelasan sasaran kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo dalam bidang investasi. Untuk itu penulis mendorong penyebaran informasi mengenai potensi Kabupaten Gorontalo, baik melalui media cetak, elektronik, majalah, kanal youtube, dan media-media lainnya yang dapat menjadikan sumber informasi bagi masyarakat serta calon investor. Pentingnya legitimasi informasi adalah untuk mencari seberapa jauh masyarakat mau menerima kehadiran para investor. legitimasi informasi dapat diperoleh Pemerintah Daerah dalam berbagai cakupan diantaranya: a) secara procedural; b) secara keterwakilan; dan c) secara simbolis; 2) Pada indikator akuntabilitas capaian kinerja organisasi dominan informan dan berbagai pertimbangan para ahli serta analisis penulsi mengharapkan adanya Penyederhanaan perizinan berusaha diharapkan dapat menyerap tenaga kerja ditengah persaingan yang semakin kompetitif. Hal tersebut mencakup: a) Keadilan; b) Kemandirian dan c) Keseimbangan

**Kata Kunci:** Penanaman Modal; Investasi Daerah; Akuntabilitas

#### **ABSTRACT**

*This article aims to analyze and describe 1) how the regional government's strategic policies improve the investment climate; and 2) how the performance of regional apparatus organizations in improving the investment climate. The research method used is a*

*qualitative method. The data analysis used is an interactive model analysis which consists of three components of analysis namely: 1) Data reduction; 2) Data Presentation; 3) Data Verification and Conclusion Drawing. The results of the article show that: 1) In terms of accountability indicators for regional government strategic policies, the dominance of informants and various expert considerations as well as the author's analysis expects clarity of policy objectives taken by the Gorontalo Regency regional government in the investment sector. For this reason, the author encourages the dissemination of information about the potential of Gorontalo Regency, both through print media, electronics, magazines, YouTube channels, and other media that can become a source of information for the public and potential investors. The importance of information legitimacy is to find out how far the public is willing to accept the presence of investors. the legitimacy of information can be obtained by the Regional Government in various scopes including: a) procedurally; b) on a representative basis; and c) symbolically; 2) In the indicators of accountability for organizational performance, the dominant informant and various expert considerations and analysis by the writer expect that there will be a simplification of business licensing which is expected to be able to absorb labor in the midst of increasingly competitive competition. These include: a) Justice; b) Independence and c) Balance*

**Keywords:** *Investment; Regional Investment; Accountability*

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan di tingkat nasional dan daerah sangat bergantung pada investasi. Biasanya, peningkatan investasi akan mengikuti pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu wilayah yang lebih tinggi. Karena investor mempertimbangkan sejauh mana pertumbuhan ekonomi kawasan saat memutuskan di mana akan menaruh uangnya. Selain itu, kecenderungan kepercayaan investor terhadap suatu daerah ditentukan oleh faktor-faktor seperti stabilitas, keamanan, politik, infrastruktur, dan karakteristik masyarakat. Globalisasi membuat semakin penting bagi pemerintah daerah untuk menemukan cara untuk menginspirasi lebih banyak investor untuk memasukkan uang ke dalam perekonomian. Sebab, pemerintah pusat mewajibkan pemerintah daerah untuk menggunakan sumber daya alam dan manusia di daerahnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan terlalu mengandalkan dana transfer. Pemerintah daerah dan masyarakat sama-sama akan merasakan manfaat dari peningkatan investasi di daerah, yang akan berdampak lebih besar pada pembangunan ekonomi dan sosial.

Kepala daerah terpilih tidak bisa hanya memenuhi harapan masyarakat dengan komitmen dan janji yang manis. Kecerdasan, integritas, dan kepemimpinan yang kuat dari para pemimpin daerah sangat diperlukan di tengah pandemi Covid-19 yang belum selesai. Salah satu caranya adalah dengan mendorong investasi di daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di sana. Wujud dari menghasilkan karya produktif bagi pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi di daerah adalah

memperkuat akuntabilitas kinerja. Hal ini tidak terlepas dari peran aparatur sipil negara dalam menerjemahkan visi dan misi kepala daerah untuk memperbaiki iklim investasi. Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu daerah yang berdiri sejak tahun 1959; Secara alami, diharapkan dapat berbicara banyak dengan membangun tren peningkatan investasi yang menguntungkan, yang dapat berdampak pada pengembangan wilayah. Namun, mayoritas pihak, termasuk investor, masih meragukan hal tersebut. Padahal Kabupaten Gorontalo mengungguli sejumlah Kabupaten dan Kota lain di Provinsi Gorontalo dalam potensi sumber daya alamnya. Kabupaten Gorontalo harus mampu memimpin pembangunan Provinsi Gorontalo yang masih menjadi provinsi termiskin kelima di Indonesia meski berpenduduk lebih dari 360.000 jiwa, menjadikannya provinsi terbesar di provinsi tersebut.

Penulis menemukan beberapa pemetaan masalah di Kabupaten Gorontalo. Dari jumlah tersebut, setidaknya ada tiga masalah utama yang terkait dengan lambatnya peningkatan investasi: 1) masalah perizinan yang sulit, rumit, dan berbelit-belit. lisensi; 2) Salah satu faktor yang memperlambat atau menghambat investor untuk berinvestasi adalah masalah pembebasan tanah. padahal masyarakat sebagai pemilik tanah yang akan dibeli oleh calon investor harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan investor dan pemerintah daerah; 3) Permasalahan regulasi atau kebijakan Hal ini masih menjadi permasalahan umum di Indonesia, termasuk di Kabupaten Gorontalo, dimana kebijakan dari kementerian dan lembaga pusat yang tidak sejalan sedikit pun tidak bertentangan dengan kepentingan investor, seperti analisis mengenai dampak lingkungan , menyebabkan tumpang tindih peraturan antar OPD terkait; 4) Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Ketidakmampuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk merumuskan agenda yang dapat memperbaiki iklim investasi sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang tinggal di Kabupaten Gorontalo sering disebut sebagai faktor kegagalan mereka untuk memperbaiki iklim investasi. Menurut temuan wawancara penulis dengan orang-orang yang mengetahui tentang akuntabilitas kinerja aparatur di bidang investasi, salah satu faktor yang mempengaruhi lambatnya produktivitas kinerja di bidang investasi adalah proses pelayanan teknis yang masih menjadi hambatan antar OPD di Gorontalo. Daerah. Selain itu, pedoman di masing-masing OPD terkait dengan bagian spekulasi dan perizinan berbeda karena memiliki prinsip masing-masing. Karena akan bertentangan dengan peraturan di atas, seperti Peraturan Menteri di setiap hirarki OPD, masalah ini tidak bisa serta merta diselesaikan di tingkat teknis.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah dalam rangka memberikan pelayanan, meningkatkan partisipasi, memprakarsai proyek, dan memberdayakan masyarakat. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah memiliki pilihan dan kewenangan untuk mengembangkan suatu kebijakan daerah, baik yang bersifat umum maupun khusus dan dalam bentuk petunjuk teknis operasional. dNature menyelenggarakan agenda otonomi daerah sesuai dengan tujuan pemberiannya, yaitu dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan daya saing daerah dalam suasana kerukunan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan ini akan menjadi pedoman bagi seluruh pemerintah daerah.

Amanat konstitusi sebelumnya sangat memperjelas bahwa salah satu tanggung jawab pemerintah adalah mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya, salah satunya dengan berupaya membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Menurut hasil wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat di Kabupaten Gorontalo yang mengevaluasi siklus ekonomi, kehadiran industri swasta tampaknya tidak cukup untuk menjelaskan tingginya tingkat pengangguran dan pertumbuhan tenaga kerja tahunan yang signifikan. Banyak pekerjaan yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk mendapatkan investasi, mulai dari UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) hingga industri yang bisa lebih banyak bercerita tentang “Jemput Bola” berinvestasi di daerah. Hal yang sama juga diupayakan melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, yang harus diikuti oleh setiap pemerintah daerah, termasuk pemerintah Kabupaten Gorontalo. Target investasi nasional dari tahun 2020 hingga 2024 adalah Rp, menurut data BKPM. 4,982 Triliun USD Sementara itu, pantauan dari Dewan Pelaksana Kemerdekaan Wilayah (KPPDOD) mengatakan, hal utama dalam mendapatkan bola spekulasi di daerah tidak bisa lepas dari penggunaan pedoman yang layak sehingga calon pendukung keuangan lebih tertarik pada menempatkan sumber daya ke lokal. Namun, hal tersebut belum sepenuhnya diterapkan di Kabupaten Gorontalo.

Berikut data jumlah pelaku usaha di Kabupaten Gorontalo dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang penulis sajikan:

**Tabel 1: Jumlah Pelaku Usaha 2016-2020**

NO.	URAIAN PER SEKTOR	JUMLAH PELAKU USAHA					KET.
		TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN2 018	TAHUN2 019	TAHUN *2020	
	<b>SEKTOR PRIMER</b>						
	TANAMAN PANGAN & PERKEBUNAN	1	0	1	6	9	
	PETERNAKAN	9	3	0	21	3	
	PERIKANAN	0	0	0	0	3	
	<b>SEKTOR SEKUNDER</b>						
	INDUSTRI MAKANAN	12	12	1	28	13	
	INDUSTRI TEKSTIL	2	2	1	11	3	
	INDUSTRI BARANG KULIT & PLASTIK	1	0	0	1	0	
	INDUSTRI KAYU	13	8	7	15	13	
	INDUSTRI KERTAS DAN PERCETAKAN	1	7	3	4	5	
	INDUSTRI LAINNYA	16	11	7	46	17	
	KONSTRUKSI	88	68	51	200	71	
	LISTRIK, GAS DAN AIR	0	1	0	4	4	
	PERDAGANGAN & REPARASI	238	201	64	641	158	
	HOTEL DAN RESTORAN	16	5	5	13	9	
	TRANSPORTASI, GUDANG DAN KOMUNIKASI	18	6	5	10	28	
	PERUMAHAN, KWSAN INDUSTRI & PERKANTORAN	20	29	12	32	33	
	JASA LAINNYA	63	65	29	191	68	
	PERTAMBANGAN	0	0	0	0	9	
	<b>JUMLAH</b>	<b>498</b>	<b>418</b>	<b>186</b>	<b>1223</b>	<b>446</b>	

**Sumber data: Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021**

Terlihat dari uraian data di atas bahwa antara tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan pertumbuhan pelaku usaha baru. Hal ini menunjukkan bahwa rencana pemerintah daerah untuk menarik investasi sedikit berubah. Menurut temuan wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pertanian, salah satu faktor yang mempengaruhi ketersediaan lahan adalah data statistik jumlah pelaku usaha yang cenderung kurang konsisten setiap tahunnya. Selain itu, Kepala Dinas Pertanian menyatakan bahwa setiap investasi membutuhkan ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur, sehingga fungsi Dinas Pertanian menjadi sangat penting karena lahan pertanian akan digunakan untuk kepentingan nonpertanian. Jika tidak ditanggapi secara serius sejak saat ini, fenomena alih guna lahan, khususnya di Kabupaten Gorontalo, niscaya dapat menimbulkan permasalahan yang signifikan di masa mendatang. Implikasinya, lahan pertanian dapat dikonversi tanpa terkendali sehingga mengancam produksi pangan bahkan menimbulkan kerugian sosial dalam jangka panjang. Banyak contoh yang menunjukkan bahwa jika penggunaan lahan suatu

lokasi berubah, maka lahan di sekitarnya juga akan berubah fungsi secara bertahap dalam waktu singkat. Tugas Dinas Pertanian adalah memberikan saran perubahan darat mengacu pada SOP yang telah dipesan.

Hartini, N. T. (2017), dalam jurnal penelitiannya tentang pemutakhiran aspek penyelenggaraan pemerintahan mengungkapkan bahwa setidaknya Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan ketika memasuki era reformasi, khususnya terkait dengan sistem pengelolaan perencanaan, sumber daya manusia, pembiayaan, pengelolaan pelayanan publik, pengelolaan aset/investasi, pengelolaan kolaborasi, dan pengelolaan konflik, dalam rangka akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo. Demikian pula diperlukan manajemen yang handal untuk melakukan pengawasan karena otonomi diberikan untuk mencapai tujuan tertentu yang akan membawa konsekuensi pada pemanfaatan sumber daya pemerintah, baik dalam struktur pemerintahan daerah maupun sumber daya daerah lainnya.

Selanjutnya Putri, M. D., Adnan, M., dan Herawati, N. R. (2016), dalam penelitiannya yang dipublikasikan dalam jurnal ditemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Cirebon menggunakan empat strategi untuk menarik investasi. Citra, daya tarik, infrastruktur, dan pemasaran orang adalah empat strategi. Keseluruhan strategi Pemerintah Kabupaten Cirebon berjalan dengan baik, merupakan kabar baik bagi masyarakat. Namun, belum ada kepastian dan kejelasan peraturan hukum yang mengatur penanaman modal dan perizinan, sehingga hasilnya belum optimal atau berhasil. Proses birokrasi untuk mendapatkan izin saat ini dinilai sangat rumit. Strategi pemerintah tampaknya hanya meningkatkan realisasi investasi, namun tidak berdampak signifikan baik bagi pembangunan masyarakat maupun pembangunan daerah.

Sederhananya, akuntabilitas adalah tanggung jawab. Menurut Imbaruddin, A. (2019), akuntabilitas adalah kewajiban pemberi fidusia (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pemberi fidusia (principal), yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban, serta menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan menurut H. Sofyani dan M. A. Prayudi Instrumen pertanggungjawaban atas tercapai atau tidaknya tanggung jawab, fungsi, dan misi utama organisasi adalah akuntabilitas.

Penulis kemudian merumuskan persoalan akuntabilitas kinerja aparatur dalam perbaikan iklim investasi dari dua perspektif utama, yaitu 1) bagaimana kebijakan strategis pemerintah daerah untuk memperbaiki iklim

investasi; 2) Bagaimana kinerja organisasi perangkat daerah dalam meningkatkan iklim investasi.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif. Dikatakan kualitatif karena dalam mengkaji permasalahan peneliti tidak membuktikan ataupun menolak hipotesis yang dibuat sebelum penelitian tetapi mengolah data dan menganalisis dengan baik suatu masalah secara *non numerik*. Metode Kualitatif untuk menguji hipotesis atau teori.

Tipe penelitian ini memfokuskan pada deskripsi data yang berupa kalimat-kalimat yang memiliki makna mendalam berasal dari informan dan perilaku masyarakat, serta keadaan yang diamati. Data hasil penelitian ini berupa fakta-fakta yang ditemukan pada saat di lapangan oleh peneliti (Sugiyono, 2016). dengan menggunakan metode ini peneliti dapat menggambarkan secara detail mengenai permasalahan akuntabilitas kinerja aparatur dalam meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Gorontalo.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah mengamati kondisi mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh terkait permasalahan akuntabilitas kinerja aparatur dalam meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Gorontalo. Penulis mewawancarai satu persatu informan peneliti yang terdiri dari unsur aparatur pemerintah daerah yang bersentuhan langsung dengan investasi, masyarakat kabupaten Gorontalo serta beberapa calon investor yang memiliki kendala dalam investasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data di lapangan yaitu meliputi aktivitas pengumpulan data, *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* atau penarikan kesimpulan/verifikasi. (Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J 2014)

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbagai macam barang dan jasa telah muncul sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi yang cepat dan kemajuan teknologi industri, yang menyediakan berbagai pilihan bagi pelanggan. Karena investasi akan mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi secara keseluruhan, maka setiap investasi akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Penanam modal atau penanam modal yang memberikan perlindungan hukum atas modal yang ditanamkan

tunduk pada tingkat kepastian hukum yang sama mengenai peraturan dari negara atau daerah penerima penanaman modal.

Jika investor datang untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Gorontalo, satu hal yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah adalah jaminan perangkat hukum yang jelas artinya antara satu dengan yang lainnya tidak saling berbenturan, Baik itu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo terus berupaya untuk memudahkan investor masuk ke wilayahnya. Perubahan Kebijakan Omnibus Law merupakan salah satu cara serius yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk bertanggung jawab. Mencermati hasil pertemuan pakar dengan Pimpinan Bappeda Daerah Gorontalo, dia menilai, Omnibuslaw seharusnya memiliki opsi untuk menentukan persoalan pedoman dan administrasi peliputan. Kabupaten Gorontalo dapat memanfaatkan kemampuan Omnibuslaw untuk melayani masyarakat dengan baik dan menarik investor skala besar dari seluruh dunia. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa proses pengambilan kebijakan tidak hanya harus menata pola pikir birokrat untuk memberikan pelayanan profesional yang efektif dan efisien, tetapi juga membentuk regulasi yang dapat memberikan kepastian hukum bagi investor asing.

Sub bab artikel berikut ini membahas dua indikator yang peneliti gunakan untuk mengukur perkembangan investasi di Kabupaten Gorontalo:

### **1. Akuntabilitas Kebijakan Strategis Pemerintah Daerah**

Akuntabilitas kinerja aparatur jika dilihat dari aspek tingkat kepekaan organisasi terhadap keluhan masyarakat dan investor terhadap pelayanan penanaman modal, maka sebagaimana diketahui bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo (DPM-PTSP) salah satu fungsinya adalah penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang penanaman modal. Hal tersebut sesuai dengan pendapat salah seorang pegawai di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo (DPM-PTSP) yang menyatakan bahwa: Dalam rangka meningkatkan citra pelayanan yang diselenggarakan oleh organisasi pemerintah khususnya DPM-PTSP, Bupati Kabupaten Gorontalo telah menekankan kepada seluruh aparatur pelaksana untuk selalu tanggap pada permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat pemohon perizinan penanaman modal. Jadi, apabila ada informasi, pengaduan dan klarifikasi dari masyarakat.

Akuntabilitas kebijakan juga merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan

dimiliki oleh stake holders, seperti nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Sejak implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dilaksanakan, telah terjadi perubahan regulasi terutama terkait kewenangan yang dilaksanakan di tingkat pusat dan pemerintah daerah. Responsibilitas penyesuaian regulasi tersebut di daerah, ditanggapi oleh Bappeda Kabupaten Gorontalo dengan mengatakan bahwa: Kendala yang dihadapi pemerintah daerah saat ini adalah 1) pemerintah daerah wajib menyesuaikan dan mengevaluasi kembali seluruh peraturan yang sudah tidak sesuai lagi; 2) Proses penyesuaian peraturan membutuhkan alokasi anggaran dan waktu; 3) Perubahan-perubahan regulasi di tingkat pusat belum tersosialisasikan ke masyarakat; 3) Pelayanan public menjadi stagnan terkait kesiapan daerah dalam penyesuaian regulasi.

Dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2009:) memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang membentuk indikator yang digunakan untuk menilai kinerja suatu organisasi, yang meliputi: 1) "*tangibles*", juga dikenal sebagai "penampilan fisik", mengacu pada penampilan bangunan, peralatan, pekerja, dan fasilitas penyedia lainnya; 2) Kemampuan untuk memberikan layanan yang dijanjikan secara akurat dikenal sebagai keandalan. 3) Bersikap tanggap atau bersedia membantu pelanggan dan menawarkan layanan yang tulus adalah daya tanggap; 4) Jaminan adalah pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan karyawan untuk menanamkan kepercayaan pelanggan; 5) Empati adalah perawatan dan perlakuan pribadi pelanggan oleh penyedia.

Sementara itu, Imbaruddin, A. (2019) menyarankan untuk menggunakan kriteria berikut sebagai pedoman penilaian kinerja organisasi pelayanan publik untuk mengevaluasi kinerja organisasi: 1) Efektivitas Berkaitan dengan pertimbangan tentang hasil asosiasi bantuan publik untuk mendapatkan keuntungan, gunakan unsur-unsur penciptaan serta kontemplasi mulai dari penegasan keuangan. Kriteria seperti likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas merupakan kriteria efisiensi yang sangat relevan bila diterapkan secara objektif; 2) Efisiensi. Apakah pembentukan organisasi pelayanan publik berhasil? Ini terkait erat dengan kehati-hatian khusus, nilai-nilai, misi, tujuan otoritatif, dan unsur-unsur spesialis perbaikan; 3) Ekuitas meneliti cara di mana organisasi pelayanan publik mengalokasikan layanan mereka. Gagasan kecukupan atau kesesuaian terkait erat dengan kriteria ini. Keduanya menanyakan apakah kebutuhan dan nilai masyarakat dapat dipenuhi pada tingkat keefektifan tertentu. Kriteria ini akan dapat menjawab pertanyaan tentang pemerataan pembangunan, pelayanan bagi kelompok marjinal, dan topik lainnya; 4)

Penerimaan. Organisasi pelayanan publik, berbeda dengan bisnis yang dijalankan oleh bisnis swasta, merupakan komponen dari kemampuan negara atau pemerintah untuk menanggapi kebutuhan masyarakat yang kritis. Untuk memenuhi kriteria daya tanggap ini, kriteria organisasi secara keseluruhan perlu dipertanggungjawabkan secara transparan.

Penulis melihat bahwa secara kelembagaan, OPD Pemerintah Kabupaten Gorontalo harus mampu mendukung produktivitas ekonomi dengan mengatur iklim usaha, mengamankan hak milik, menyiapkan infrastruktur, dan menawarkan insentif untuk mendorong investasi. Karena penulis percaya bahwa investor mungkin kurang tertarik untuk berinvestasi jika tidak ada jaminan bahwa properti mereka akan terlindungi. Inilah yang dikatakan Kharisma, B. (2019) dalam jurnal penelitiannya: "Jika reformasi kelembagaan untuk meningkatkan kualitas organisasi tidak dilakukan, maka tidak akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi." Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa pertanggungjawaban kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Gorontalo juga harus memperhatikan informasi tentang potensi daerah dan iklim investasi karena calon investor akan sangat mengandalkan informasi tersebut dalam pengambilan keputusan investasi. Informasi ini mencakup informasi tentang kondisi ekonomi makro daerah, infrastruktur, dan pendapatan per orang, atau bahkan budaya suatu daerah. Oleh karena itu, penulis mendorong ketersediaan informasi ini. Oleh karena itu, salah satu tujuan artikel ini adalah untuk memberikan gambaran kepada pembaca tentang keadaan wilayah Kabupaten Gorontalo.

Industri pariwisata adalah bidang lain di mana stimulus investasi dapat disorot. Rezim Gorontalo memiliki potensi wisata yang sangat lengkap, seperti Danau Limboto, garis pantai yang panjang, aliran sungai, lereng dan pegunungan. Sayangnya, pemerintah daerah dan investor belum sepenuhnya memanfaatkan semua ini. Padahal Sinarta, I. N. (2021) mengungkapkan bahwa industri pariwisata memiliki multiplier effect karena mempengaruhi berbagai kehidupan masyarakat, khususnya mereka yang berkecimpung dalam industri tersebut di daerah yang sedang berkembang. Lokasi tersebut masih dalam kondisi memprihatinkan sehingga menyulitkan investor untuk berinvestasi di sana.

Berdasarkan hasil penelitian dan pandangan dari para ahli di atas maka penulis berkesimpulan bahwa akuntabilitas kinerja aparatur dalam bidang investasi di Kabupaten Gorontalo merupakan bentuk perwujudan kewajiban individu atau kelompok terhadap unit organisasi untuk setiap kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi

masyarakat Kabupaten Gorontalo. Peningkatan investasi juga peneliti yakini dapat mendongkrak pembangunan ekonomi di Kabupaten Gorontalo. Investasi juga sebagai salah satu komponen dari Pendapatan Domestic Regional Bruto (PDRB). Untuk itu pemerintah daerah perlu mempertegas sasaran kebijakan yang dapat menguntungkan kedua pihak baik pemerintah daerah dan calon investor. Caranya adalah dengan mendorong penyebarluasan informasi mengenai potensi Kabupaten Gorontalo, baik melalui media cetak, elektronik, majalah, kanal youtube, dan media-media lainnya yang dapat menjadikan sumber informasi bagi masyarakat serta calon investor. Pentingnya legitimasi informasi adalah untuk mencari seberapa jauh masyarakat mau menerima kehadiran para investor. legitimasi informasi dapat diperoleh Pemerintah Daerah dalam berbagai berbagai cakupan diantaranya: a) secara procedural; b) secara keterwakilan; dan c) secara simbolis.

## **2. Akuntabilitas Capaian Kinerja Organisasi**

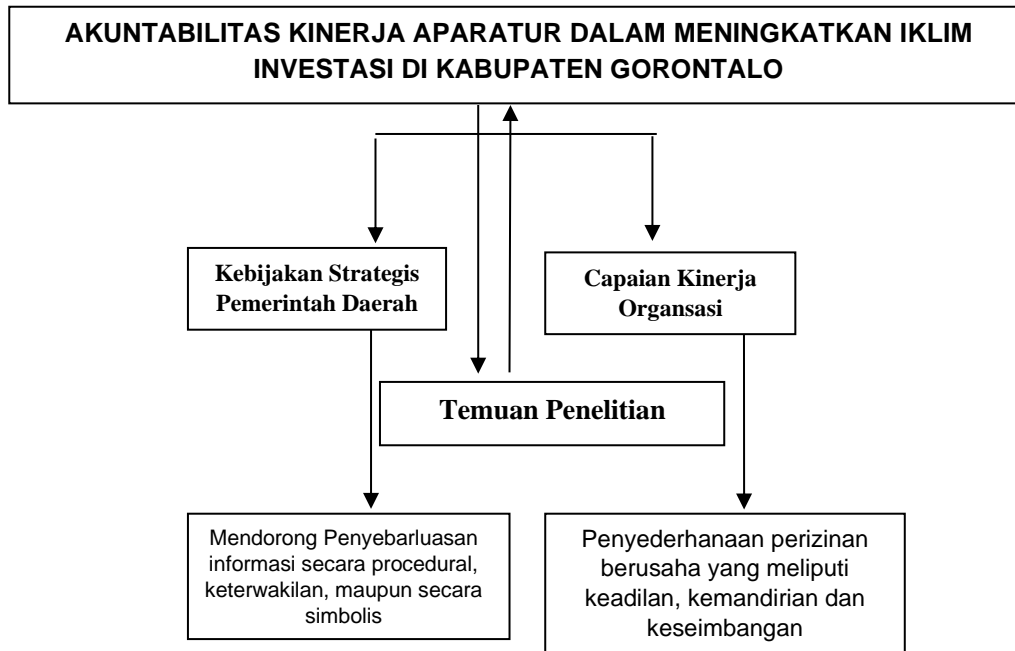
Dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2009:) jika pendapat Zeithaml, Parasuraman, dan Berry dikaitkan dengan hasil wawancara dengan informan di atas, 175) memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang membentuk indikator yang digunakan untuk menilai kinerja suatu organisasi, yang meliputi: 1) "*tangibles*", juga dikenal sebagai "penampilan fisik", mengacu pada penampilan bangunan, peralatan, pekerja, dan fasilitas penyedia lainnya; 2) Kemampuan untuk memberikan layanan yang dijanjikan secara akurat dikenal sebagai keandalan. 3) Bersikap tanggap atau bersedia membantu pelanggan dan menawarkan layanan yang tulus adalah daya tanggap; 4) Jaminan adalah pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan karyawan untuk menanamkan kepercayaan pelanggan; 5) Empati adalah perawatan dan perlakuan pribadi pelanggan oleh penyedia.

Sementara itu, Imbaruddin, A. (2019) menyarankan untuk menggunakan kriteria berikut sebagai pedoman penilaian kinerja organisasi pelayanan publik untuk mengevaluasi kinerja organisasi: 1) Efektivitas Berkaitan dengan pertimbangan tentang hasil asosiasi bantuan publik untuk mendapatkan keuntungan, gunakan unsur-unsur penciptaan serta kontemplasi mulai dari penegasan keuangan. Kriteria seperti likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas merupakan kriteria efisiensi yang sangat relevan bila diterapkan secara objektif; 2) Efisiensi. Apakah pembentukan organisasi pelayanan publik berhasil? Ini terkait erat dengan kehati-hatian khusus, nilai-nilai, misi, tujuan otoritatif, dan unsur-unsur spesialis perbaikan; 3) Ekuitas Meneliti cara di mana organisasi pelayanan publik mengalokasikan layanan mereka. Gagasan kecukupan atau kesesuaian terkait erat dengan kriteria ini. Keduanya menanyakan apakah kebutuhan

dan nilai masyarakat dapat dipenuhi pada tingkat keefektifan tertentu. Kriteria ini akan dapat menjawab pertanyaan tentang pemerataan pembangunan, pelayanan bagi kelompok marjinal, dan topik lainnya; 4) Penerimaan. Organisasi pelayanan publik, berbeda dengan bisnis yang dijalankan oleh bisnis swasta, merupakan komponen dari kemampuan negara atau pemerintah untuk menanggapi kebutuhan masyarakat yang kritis. Untuk memenuhi kriteria daya tanggap ini, kriteria organisasi secara keseluruhan perlu dipertanggungjawabkan secara transparan.

Penulis melihat bahwa secara kelembagaan, OPD Pemerintah Kabupaten Gorontalo harus mampu mendukung produktivitas ekonomi dengan mengatur iklim usaha, mengamankan hak milik, menyiapkan infrastruktur, dan menawarkan insentif untuk mendorong investasi. Karena penulis percaya bahwa investor mungkin kurang tertarik untuk berinvestasi jika tidak ada jaminan bahwa properti mereka akan terlindungi. Inilah yang dikatakan Kharisma, B. (2019) dalam jurnal penelitiannya: "Jika reformasi kelembagaan untuk meningkatkan kualitas organisasi tidak dilakukan, maka tidak akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi." Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa pertanggungjawaban kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Gorontalo juga harus memperhatikan informasi tentang potensi daerah dan iklim investasi karena calon investor akan sangat mengandalkan informasi tersebut dalam pengambilan keputusan investasi. Informasi ini mencakup informasi tentang kondisi ekonomi makro daerah, infrastruktur, dan pendapatan per orang, atau bahkan budaya suatu daerah. Oleh karena itu, penulis mendorong ketersediaan informasi ini. Oleh karena itu, salah satu tujuan artikel ini adalah untuk memberikan gambaran kepada pembaca tentang keadaan wilayah Kabupaten Gorontalo.

Industri pariwisata adalah bidang lain di mana stimulus investasi dapat disorot. Kabupaten Gorontalo memiliki potensi wisata yang sangat lengkap, seperti Danau Limboto, garis pantai yang panjang, aliran sungai, lereng dan pegunungan. Sayangnya, pemerintah daerah dan investor belum sepenuhnya memanfaatkan semua ini. Padahal Sinarta, I. N. (2021) mengungkapkan bahwa industri pariwisata memiliki multiplier effect karena mempengaruhi berbagai kehidupan masyarakat, khususnya mereka yang berkecimpung dalam industri tersebut di daerah yang sedang berkembang. Lokasi tersebut masih dalam kondisi memprihatinkan sehingga menyulitkan investor untuk berinvestasi di sana.



**Gambar 1. Kerangka temuan artikel**

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis temuan hasil penelitian serta berbagai analisis dari pendapat ahli diatas maka yang menjadi simpulan dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Pada indikator akuntabilitas kebijakan strategis pemerintah daerah, dominan informan dan berbagai pertimbangan para ahli serta analisis penulis mengharapkan adanya kejelasan sasaran kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo dalam bidang investasi. Untuk itu penulis mendorong penyebarluasan informasi mengenai potensi Kabupaten Gorontalo, baik melalui media cetak, elektronik, majalah, kanal youtube, dan media-media lainnya yang dapat menjadikan sumber informasi bagi masyarakat serta calon investor. Pentingnya legitimasi informasi adalah untuk mencari seberapa jauh masyarakat mau menerima kehadiran para investor. legitimasi informasi dapat diperoleh Pemerintah Daerah dalam berbagai berbagai cakupan diantaranya: a) secara procedural; b) secara keterwakilan; dan c) secara simbolis.

2. Pada indikator akuntabilitas capaian kinerja organisasi dominan informan dan berbagai pertimbangan para ahli serta analisis penulsi mengharapkan adanya Penyederhanaan perizinan berusaha diharapkan dapat menyerap tenaga kerja ditengah persaingan yang semakin kompetitif. Hal tersebut mencakup: a) Keadilan; b) Kemandirian dan c) Keseimbangan

### DAFTAR PUSTAKA

- Atminto Dan Atik Winarsih. (2009). Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka. Pelajar
- Bukit, Benjamin, Tasman Malusi, & Abdul Rahmat. 2017. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Teori, Dimensi Pengukuran, Dan Implementasi Dalam Organisasi. Yogyakarta:Zahir Publising.
- Hartini, N. t (2017). *PENGARUH PDRB PER KAPITA, INVESTASI DAN...NDAPATAN ANTAR DAERAH DI PROVINSI DAER.pdf*. (n.d.).
- Hernawati, R. A. S., & Suroso, J. T. (2020). Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi)*, 4(1), 392–408. <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/557>
- Imbaruddin, A. (2019). *Birokrasi, Akuntabilitas, Kinerja*. Deepublish.
- Kambono, H., & Marpaung, E. I. (2020). Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 12(1), 137–145. <https://doi.org/10.28932/jam.v12i1.2282>
- Rahmawatin, R., & Kharisma, B. (2020). Peran Investasi Terhadap Perekonomian Daerah : Studi Kasus Di Kabupaten Garut. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, May, 161. <https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i02.p03>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., Dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. Usa: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, Ui-Press
- Putri, M. D., Adnan, M., & Herawati, N. R. (2016). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Investasi Di Kabupaten Cirebon Tahun 2015. *Journal Of Politic And Government Studies*, 6(01), 41-50.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dan R dan D*. Alfabeta.
- Sofyani, H., & Prayudi, M. A. (2018). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Daerah dengan Akuntabilitas Kinerja "A." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 13(1), 54–64. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/download/35755/22921/>

Wahyuni, P. I., Muliawan, I. W., Rangan, P. R., Sahabuddin, A. A., Dana, G. Wi. P., Tumpu, M., Mabui, D., Mansyur, Kusuma, A., Kurniawan, A., & Sinarta, I. N. (2021). Investasi pariwisata indonesia. *Tahar Media, November*.

Zazili, A. (2016). Pemberian Insentif Penanaman Modal Sebagai Upaya Daya Tarik Investasi Di Daerah. *Jurnal Cakrawala Hukum, 7(1)*.  
<https://doi.org/10.26905/idjch.v7i1.1786>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  
Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja